

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT**

NOTA DINAS
NOMOR : W.31.PR.04.01 - 55

Yth : 1. Para Kepala Divisi;
2. Pejabat Administrator dan Pengawas
3. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Papua Barat

Dari : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua
Barat

Hal : Pemberitahuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kepala Divisi
di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Papua Barat

Tanggal : 28 Februari 2024

Menindaklanjuti kegiatan Supervisi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Wilayah bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka telah ditetapkan **Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024** (terlampir) yang **WAJIB dilaksanakan dan dilaporkan oleh seluruh Divisi** guna mengontrol Target Capaian Kinerja yang sudah ditandatangani oleh seluruh Kepala Divisi lewat dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Mekanisme pengumpulan dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja akan disosialisasikan oleh Sub Bagian Program Pelaporan (**waktu dan tempat akan disampaikan kemudian**).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Taufiqurrakhman
NIP. 196811181991031001

**RENCANA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DIVISI ADMINISTRASI TA 2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN						
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	Perolehan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal di angka 3,1	dihitung berdasarkan hasil Survei Integritas pegawai Kantor Wilayah Papua Barat terkait layanan internal pada Kantor Wilayah Papua Barat yang dilaksanakan secara mandiri berbasis elektronik melalui laman website resmi : https://survei.baitsbangham.go.id/ dari Badan Penilaian dan Pengembangan Hukum dan HAM.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Layanan BMN,Layanan Humas dan Informasi Publik,Layanan Umum,Layanan Manajemen SDM Internal,Layanan Manajemen Kinerja Internal,Layanan Pemantauan dan Evaluasi)	Rp 15.424.610.000	Rp 4.363.018.000		TW I 1. Pembinaan dan Pengelolaan BMN 2. Monitoring dan Pelaporan BMN 3. Penyediaan Informasi Publik 4. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian 5. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 6. Penyusunan Manajemen Risiko 7. Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) 8. Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan 9. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 10. Pengelolaan Kearsipan	TW I	NILAI SURVEY BULAN JANUARI - MARET	HASIL SURVEY BULAN JANUARI - MARET	Sudah dilaksanakan						
						Belum dilaksanakan												
						Sudah dilaksanakan												
						Sudah dilaksanakan												
					Belum dilaksanakan													
					Belum dilaksanakan													
					Belum dilaksanakan													
					Belum dilaksanakan													
					Belum dilaksanakan													
					Belum dilaksanakan													
					Belum dilaksanakan													
					Belum dilaksanakan													
					Belum dilaksanakan													
					Belum dilaksanakan													
										Rp 3.323.462.000			TW II 1. Monitoring dan Pelaporan BMN 2. Penyediaan Informasi Publik 3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 4. Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan 5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 6. Penilaian Mandiri SAKIP 7. Pengelolaan Kearsipan	TW II	NILAI SURVEY BULAN APRIL - JUNI	HASIL SURVEY BULAN JANUARI - MARET	Belum dilaksanakan	
					Belum dilaksanakan													
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
					Rp 3.955.407.000			TW III 1. Monitoring dan Pelaporan BMN 2. Penyediaan Informasi Publik 3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 4. Pembinaan dan Pengelolaan Laporan 5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 6. Pengelolaan Kearsipan	TW III	NILAI SURVEY BULAN JULI - SEPTEMBER	HASIL SURVEY BULAN JULI - SEPTEMBER	Belum dilaksanakan						
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
					Rp 3.782.723.000			TW IV 1. Monitoring dan Pelaporan BMN 2. Penyediaan Informasi Publik 3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 4. Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan 5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 6. Pengelolaan Kearsipan	TW IV	NILAI SURVEY BULAN OKTOBER - DESEMBER	HASIL SURVEY BULAN OKTOBER - DESEMBER	Belum dilaksanakan						
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		
Belum dilaksanakan																		



Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah

 Ditandatangani secara elektronik dan
TAUFIQURRAKHMAN
 NIP. 19681118 199103 1 001

**RENCANA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DIVISI PELAYANAN DAN HUKUM TA 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN												
1	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Adanya Peningkatan Nilai PNPB sebesar 5% dari tahun sebelumnya	(Jumlah PNPB tahun berjalan - jumlah PNPB tahun sebelumnya) dibagi jumlah PNPB tahun sebelumnya dikali 100%	Penyebarluasan Informasi Administrasi Hukum Umum di Kabupaten/Kota Wilayah Papua Barat	Rp.2.254.933.000	Rp.103.043.000		TW I	1. Kegiatan Sosialisasi Layanan Fidusia	TW I	JUMLAH PNPB TRIWULAN I	LAPORAN PENINGKATAN PNPB TRIWULAN I	Belum terlaksana											
									TW II	1. Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan 2. Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan 3. Melaksanakan Kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) Layanan Kenotariatan	TW II	JUMLAH PNPB TRIWULAN II	LAPORAN PENINGKATAN PNPB TRIWULAN II	Belum terlaksana											
															TW III	1. Kegiatan Sosialisasi Layanan Fidusia 2. Melaksanakan Kegiatan Public Campaign	TW III	JUMLAH PNPB TRIWULAN III	LAPORAN PENINGKATAN PNPB TRIWULAN III	Belum terlaksana					
																					TW IV	Melaksanakan Kegiatan Public Campaign	TW IV	JUMLAH PNPB TRIWULAN IV	LAPORAN PENINGKATAN PNPB TRIWULAN IV
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	Terseselaikannya Aduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Di Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan Nilai Persentase terselesaikan sebanyak 88%	(Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan) dibagi (jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk) dikali 100%	Pemeriksaan Sebagai Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris	Rp.50.000.000	Rp.50.000.000	Rp.50.000.000	Rp.50.000.000	Rp.50.000.000	TW I	1. Pemeriksaan terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh MPW	TW I	Penyelesaian Aduan	Laporan Penyelesaian Aduan	Telah Terlaksana									
											TW II	2. Pemeriksaan terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh MPD	TW II	Penyelesaian Aduan	Laporan Penyelesaian Aduan	Belum terlaksana									
											TW III	3. Pemeriksaan Notaris Terkait Aduan	TW III	Penyelesaian Aduan	Laporan Penyelesaian Aduan	Belum terlaksana									
											TW IV	4. Pemeriksaan Notaris Terkait Aduan	TW IV	Penyelesaian Aduan	Laporan Penyelesaian Aduan	Belum terlaksana									
3	Terseleenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks	Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	Rp.1.733.778.000			TW I	1. Edukasi Pencegahan Pelanggaran HKI ke Pelaku Usaha di Wilayah Papua Barat	TW II	NILAI INDEKS PENEKAKAN HUKUM KI	LAPORAN NILAI INDEKS PENEKAKAN HUKUM KI	Belum terlaksana											
									TW II	2. Pendampingan Penanganan Aduan Pelanggaran HKI di Wilayah (Jika ada Pengaduan)	TW II	NILAI INDEKS PENEKAKAN HUKUM KI	LAPORAN NILAI INDEKS PENEKAKAN HUKUM KI	Belum terlaksana											
															TW III	1. Edukasi Pencegahan Pelanggaran HKI ke Perguruan Tinggi di Wilayah	TW III	NILAI INDEKS PENEKAKAN HUKUM KI	LAPORAN NILAI INDEKS PENEKAKAN HUKUM KI	Belum terlaksana					
																					TW IV	2. Pendampingan Penanganan Aduan Pelanggaran HKI di Wilayah (Jika ada Pengaduan)	TW IV	NILAI INDEKS PENEKAKAN HUKUM KI	LAPORAN NILAI INDEKS PENEKAKAN HUKUM KI
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah	70%	Jumlah Masyarakat yang memahami KI dibagi Jumlah masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi, dikali 100%	Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah									TW I	1. Promosi dan Diseminasi Indikasi Geografis	TW II	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MEMAHAMI KI	LAPORAN PERSENTASI MASYARAKAT YANG MEMAHAMI KI	Belum terlaksana						
														TW II	2. Workshop Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual lainnya	TW II	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MEMAHAMI KI	LAPORAN PERSENTASI MASYARAKAT YANG MEMAHAMI KI	Belum terlaksana						
																				TW III	3. Pelaksanaan Agenda RUKI (Guru Kekayaan Intelektual)	TW III	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MEMAHAMI KI	LAPORAN PERSENTASI MASYARAKAT YANG MEMAHAMI KI	Belum terlaksana
TW II	1. Mobile IP Clinic di Wilayah	TW II	PENINGKATAN PERMOHONAN KI	LAPORAN PENINGKATAN PERMOHONAN KI	Belum terlaksana																				
TW III	2. Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual	TW III	PENINGKATAN PERMOHONAN KI	LAPORAN PENINGKATAN PERMOHONAN KI	Belum terlaksana																				
TW IV	1. Mobile IP Clinic di Wilayah	TW IV	PENINGKATAN PERMOHONAN KI	LAPORAN PENINGKATAN PERMOHONAN KI	Belum terlaksana																				
5	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80%	Jumlah Fasilitas Perancangan Perda / Permohonan dikali 100%	Pelaksanaan Harmonisasi	Rp.305.000.000	Rp.27.000.000	Rp.27.000.000	Rp.27.000.000	Rp.27.000.000	TW I	1. Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	TW I	PERSENTASE FASILITASI PERANCANGAN PERDA TRIWULAN I	LAPORAN FASILITASI PERANCANGAN PERDA TRIWULAN I	Belum terlaksana									
											TW II	2. Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	TW II	PERSENTASE FASILITASI PERANCANGAN PERDA TRIWULAN II	LAPORAN FASILITASI PERANCANGAN PERDA TRIWULAN II	Belum terlaksana									
											TW III	3. Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	TW III	PERSENTASE FASILITASI PERANCANGAN PERDA TRIWULAN III	LAPORAN FASILITASI PERANCANGAN PERDA TRIWULAN III	Belum terlaksana									
											TW IV	4. Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	TW IV	PERSENTASE FASILITASI PERANCANGAN PERDA TRIWULAN IV	LAPORAN FASILITASI PERANCANGAN PERDA TRIWULAN IV	Belum terlaksana									
6	Terseleenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	7	Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan	Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah	Rp.118.360.000								TW I	1. Kegiatan Sosialisasi Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah	TW IV	PEMBINAAN TERHADAP TENGA PERANCANG SEJUMLAH 7 ORANG	LAPORAN PEMBINAAN TERHADAP TENGA PERANCANG	Belum terlaksana						
														TW II	2. Pelaksanaan Aksi HAM di Wilayah papua Barat	TW II	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	LAPORAN PELAKSANAAN AKSI HAM	Belum terlaksana						
7	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	Jumlah Instansi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah	Rp.270.175.000	Rp.55.755.000								TW I	1. Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM	TW II	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	Laporan Kab/Kota Peduli HAM	Belum terlaksana					
															TW II	2. Pemantauan dan Evaluasi Kab/Kota Peduli HAM	TW IV	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	Laporan Kab/Kota Peduli HAM	Belum terlaksana					
															TW I	3. Persiapan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	TW I	Jumlah Diseminasi Penguatan HAM	Laporan Diseminasi Penguatan HAM di Wilayah	Belum terlaksana					
															TW II	4. Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	TW II	Jumlah Diseminasi Penguatan HAM	Laporan Diseminasi Penguatan HAM di Wilayah	Belum terlaksana					
TW III	5. Pelaporan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	TW III	Jumlah Diseminasi Penguatan HAM	Laporan Diseminasi Penguatan HAM di Wilayah	Belum terlaksana																				

8	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Wilayah	Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	Rp. 5.420.000	TW I	Identifikasi dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	TW I	Rekomendasi	Laporan Rekomendasi Perlindungan HAM di Wilayah	Belum terlaksana
						Rp. 44.800.000	TW II	Koordinasi dan Konsultasi dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	TW II	Rekomendasi	Laporan Rekomendasi Perlindungan HAM di Wilayah	Belum terlaksana
						Rp. 7.150.000	TW III	Penyusunan Rekomendasi Penanganan dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	TW III	Rekomendasi	Laporan Rekomendasi Perlindungan HAM di Wilayah	Belum terlaksana
						Rp. 6.350.000	TW IV	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanganan dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	TW IV	Rekomendasi	Laporan Rekomendasi Perlindungan HAM di Wilayah	Belum terlaksana
						Rp. 2.850.000	TW I	Persiapan Aksi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah	TW I	Rekomendasi	Laporan Rekomendasi Perlindungan HAM di Wilayah	Belum terlaksana
						Rp. 6.770.000	TW II	Pelaksanaan Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah	TW II	Rekomendasi	Laporan Rekomendasi Perlindungan HAM di Wilayah	Belum terlaksana
						Rp. 12.450.000	TW III	Pemantauan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah	TW III	Rekomendasi	Laporan Rekomendasi Perlindungan HAM di Wilayah	Belum terlaksana
						Rp. 1.800.000	TW IV	Pelaporan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Wilayah	TW IV	Rekomendasi	Laporan Rekomendasi Perlindungan HAM di Wilayah	Belum terlaksana
9	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan	$x = a + b + c + \dots + n$	Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah	Rp. 919.289.000						
						Rp. 25.420.000	TW III	Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah terkait UMKM	TW III	1 Kegiatan	Laporan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah terkait UMKM	Belum terlaksana
						Rp. 69.639.000	TW IV	Pelaksanaan kegiatan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah bagi Perangkat Daerah	TW IV	1 Kegiatan	Laporan Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Belum terlaksana
10	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDHN di wilayah	Persentase anggota JDHN yang dikelola terhadap total anggota JDHN di wilayah	25%	$x = \text{Jumlah anggota JDHN aktif dibagi Jumlah anggota JDHN dikali } 100\%$	Pengelolaan anggota JDHN di wilayah	Rp. 85.053.000	TW III	Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah	TW III	1 Kegiatan	Laporan Hasil Persentase anggota JDHN yang dikelola terhadap total anggota JDHN di wilayah	Belum terlaksana
						Rp. 90.000.000	TW I	Pelaksanaan pembiayaan bagi permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang disampaikan OBH	TW I	Persentase layanan bantuan hukum litigasi	Laporan Persentase layanan bantuan hukum litigasi	Belum terlaksana
11	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	Jumlah Orang Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi dibagi Seluruh Permohonan Bantuan Hukum Litigasi dikali 100%	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Rp. 90.000.000	TW II	Pelaksanaan pembiayaan bagi permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang disampaikan OBH	TW II	Persentase layanan bantuan hukum litigasi	Laporan Persentase layanan bantuan hukum litigasi	Belum terlaksana
						Rp. 90.000.000	TW III	Pelaksanaan pembiayaan bagi permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang disampaikan OBH	TW III	Persentase layanan bantuan hukum litigasi	Laporan Persentase layanan bantuan hukum litigasi	Belum terlaksana
						Rp. 90.000.000	TW IV	Pelaksanaan pembiayaan bagi permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang disampaikan OBH	TW IV	Persentase layanan bantuan hukum litigasi	Laporan Persentase layanan bantuan hukum litigasi	Belum terlaksana
						Rp. 13.337.000	TW I	Pelaksanaan pembiayaan bagi permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang disampaikan OBH	TW I	Persentase layanan bantuan hukum Non litigasi	Laporan Persentase layanan bantuan hukum Non litigasi	Belum terlaksana
						Rp. 13.337.000	TW II	Pelaksanaan pembiayaan bagi permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang disampaikan OBH	TW II	Persentase layanan bantuan hukum Non litigasi	Laporan Persentase layanan bantuan hukum Non litigasi	Belum terlaksana
						Rp. 13.337.000	TW III	Pelaksanaan pembiayaan bagi permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang disampaikan OBH	TW III	Persentase layanan bantuan hukum Non litigasi	Laporan Persentase layanan bantuan hukum Non litigasi	Belum terlaksana
						Rp. 20.800.000	TW I	Melaksanakan Kegiatan Pembinaan / Pembentukan Kelompok Kaderium / Desa / Kelurahan Binaan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	TW I	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria	Laporan Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria	Belum terlaksana
						Rp. 4.250.000	TW II	Melakukan Verifikasi Usulan Desa / Kelurahan Sadar Hukum	TW II	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria	Laporan Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria	Belum terlaksana
12	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang diindikasikan	70%	Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum dibagi Usulan Desa/Kelurahan dari kantor Wilayah dikali 100%	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	Rp. 4.810.000	TW III	Penguatan Desa/Kelurahan Binaan Menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum	TW III	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria	Laporan Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria	Belum terlaksana
						Rp. 7.275.000	TW IV	Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum	TW IV	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria	Laporan Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria	Belum terlaksana
						Rp. 33.080.000	TW I	Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	TW I	Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Strategi Kebijakan	Laporan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan (%)	Belum terlaksana
						Rp. 88.483.000	TW II	Analisis kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM	TW II	Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Strategi Kebijakan	Laporan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan (%)	Belum terlaksana
13	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang diindikasikan	80%	% Kemanfaatan = Jumlah rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dibagi jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dikali 100%	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 63.090.000	TW III	Monitoring IPK-IKM	TW III	Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Strategi Kebijakan	Laporan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan (%)	Belum terlaksana
						Rp. 32.762.000	TW IV	Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	TW IV	Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Strategi Kebijakan	Laporan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan (%)	Belum terlaksana



Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah



TAUFIQURRAHMAN
NIP. 19681116 199103 1 001

**RENCANA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DIVISI KEIMIGRASIAN TA 2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PEMARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN
Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 Indeks	menggunakan metode survei berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan setiap bulan secara real time oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melalui laman https://survei.balitbangham.go.id .	Kegiatan pelayanan Keimigrasian di Wilayah	2.149.156.000	332.219.000	71.064.200	TW I Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Keimigrasian dan Pelayanan Keimigrasian	TW I Telah dilakukan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Keimigrasian dan Pelayanan Keimigrasian di Unit Pelaksana Teknis dan Layanan Keimigrasian	Laporan Hasil Survey IKM terhadap Layanan Keimigrasian	Telah Dilaksanakan Sosialisasi Pelayanan Keimigrasian dan Pelayanan Keimigrasian di Unit Pelaksana Teknis	
						747.462.000	Nihil	TW II Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Keimigrasian dan Pelayanan Keimigrasian	TW II Telah dilakukan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Keimigrasian dan Pelayanan Keimigrasian di Unit Pelaksana Teknis dan Layanan Keimigrasian	Laporan Hasil Survey IKM terhadap Layanan Keimigrasian	Belum dilaksanakan	
						695.061.000	Nihil	TW III Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Keimigrasian dan Pelayanan Keimigrasian	TW III Telah dilakukan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Keimigrasian dan Pelayanan Keimigrasian di Unit Pelaksana Teknis dan Layanan Keimigrasian	Laporan Hasil Survey IKM terhadap Layanan Keimigrasian	Belum dilaksanakan	
						374.774.000	Nihil	TW IV Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Keimigrasian dan Pelayanan Keimigrasian	TW IV Telah dilakukan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Keimigrasian dan Pelayanan Keimigrasian di Unit Pelaksana Teknis dan Layanan Keimigrasian	Laporan Hasil Survey IKM terhadap Layanan Keimigrasian	Belum dilaksanakan	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 Indeks	(RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA)	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	2.149.156.000	332.219.000	122.654.200	TW I Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	TW I Telah dilakukan kegiatan Pengawasan Orang Asing di Wilayah	Laporan Hasil Survey IKM terhadap Layanan Keimigrasian	Telah dilaksanakan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing dan Kegiatan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	
						747.462.000	Nihil	TW II Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	TW II Telah dilakukan kegiatan Pengawasan Orang Asing di Wilayah	Laporan Hasil Survey IKM terhadap Layanan Keimigrasian	Belum dilaksanakan	
						695.061.000	Nihil	TW III Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	TW III Telah dilakukan kegiatan Pengawasan Orang Asing di Wilayah	Laporan Hasil Survey IKM terhadap Layanan Keimigrasian	Belum dilaksanakan	
						374.774.000	Nihil	TW IV Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	TW IV Telah dilakukan kegiatan Pengawasan Orang Asing di Wilayah	Laporan Hasil Survey IKM terhadap Layanan Keimigrasian	Belum dilaksanakan	



Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah



TAUFIQURRAKHMAN
NIP. 19681118 199103 1 001

**RENCANA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DIVISI PEMASYARAKATAN TA 2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN																											
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	83 Indeks	$IPFW = (A+B+C+D+E+F+G+H+I)$ dibagi 9 <i>IPFW = Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah</i> <i>A = Indeks Kapuasan Layanan Masyarakat</i> <i>B = Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan,</i> <i>C = Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat</i> <i>D = Indeks Pelayanan Tahanan</i> <i>E = Indeks Pengelolaan Bagan Baran</i> <i>F = Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana</i> <i>G = Indeks Pemenuhan Hak Narapidana</i> <i>H = Indeks Pembinaan Khusus Anak</i> <i>I = Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Masyarakat</i>	Melakukan kegiatan monitoring pada UPT masyarakat terkait 1. Indeks Keamanan di Wilayah 2. Indeks Derajat Parameter Kesehatan di Wilayah 3. Indeks Pelayanan Tahanan di Wilayah 4. Indeks Pengelolaan Bagan dan Baran di Wilayah 5. Indeks Pembinaan Narapidana di Wilayah 6. Indeks Pengawasan Anak di Wilayah 7. Indeks Pembimbingan di Wilayah 8. Indeks Kerjasama Masyarakat di Wilayah 9. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Wilayah	1.607.887.000	268.744.000	29.123.000	TW I	Melaksanakan bintorwasdal	TW I	Terlaksananya bintorwasdal	Belum terlaksana	Laporan Capaian Indeks Masyarakat lewat aplikasi SPRINTERPAS																										
						833.090.000		TW II	Melaksanakan bintorwasdal	TW II	Terlaksananya bintorwasdal																												
						411.528.000		TW III	Melaksanakan bintorwasdal	TW III	Terlaksananya bintorwasdal																												
						104.528.000		TW IV	Melaksanakan bintorwasdal	TW IV	Terlaksananya bintorwasdal																												
Meningkatnya pelayanan perawalan Narapidana/Tahanan/Anak pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah	Presentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/Anak sesuai standar	85%	$\% \text{ Pemenuhan Layanan Makanan} = AB \times 100\%$ <i>Keterangan:</i> <i>A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak</i> <i>B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak</i>	penguatan konsep manajemen penyelenggaraan makanan di UPT Masyarakat	118.562.000	118.562.000	TW II	Bimtek pengembangan profesionalisme petugas penyelenggara makanan dalam layanan gizi dan makanan (Bulan Juni)	TW II	petugas memahami konsep manajemen penyelenggaraan makanan di UPT Masyarakat	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana																											
														Presentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	$\% \text{ Layanan Kesehatan (preventif)} = AB \times 100\%$ <i>Keterangan:</i> <i>A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</i> <i>B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak</i>	Peningkatan kompetensi petugas terkait pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa	118.562.000	118.562.000	TW II	Sosialisasi kepada petugas UPT masyarakat terkait kesehatan jiwa dan fatalaksana (Juni)	TW II	Petugas paham dan mengerti terkait masalah kesehatan jiwa dan gangguan jiwa serta peran petugas menghadapi narapidana dengan gangguan jiwa	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana														
																											Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	$\% \text{ Layanan Kesehatan Maternal} = AB \times 100\%$ <i>Keterangan =</i> <i>A = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</i> <i>B = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</i>	Melakukan kerjasama dengan puskesmas/ RS dan dinas kesehatan	38.120.000	38.120.000	TW I	Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Narapidana/tahanan secara berkala (Februari)	TW I	Mendapatkan layanan kesehatan	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan movev	Belum terlaksana	
																															17.093.200	17.093.200	TW II	Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Narapidana/tahanan secara berkala (Mei)	TW II	Mendapatkan layanan kesehatan	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan movev	Belum terlaksana	
																															31.080.000	31.080.000	TW III	Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Narapidana/tahanan secara berkala (Agustus)	TW III	Mendapatkan layanan kesehatan	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan movev	Belum terlaksana	
																															37.456.800	37.456.800	TW IV	Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Narapidana/tahanan secara berkala (November)	TW IV	Mendapatkan layanan kesehatan	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan movev	Belum terlaksana	
																											Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	$\% \text{ Penanganan Gangguan Mental} = AB \times 100\%$ <i>Keterangan =</i> <i>A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</i> <i>B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental</i>	Kerjasama dengan puskesmas/ RS dan dinas kesehatan setempat	38.120.000	38.120.000	TW I	Melakukan skrining dan pemeriksaan gangguan jiwa (Februari)	TW I	Terlaksana skrining dan pemeriksaan gangguan jiwa	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan movev	Belum terlaksana	
																															17.093.200	17.093.200	TW II	Melakukan pendampingan dan konseling (Mei)	TW II	Terlaksana pendampingan dan konseling	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan movev	Belum terlaksana	
																															31.080.000	31.080.000	TW III	Melakukan observasi dan pengobatan bagi Narapidana/Tahanan (Agustus)	TW III	Terlaksana observasi dan pengobatan bagi Narapidana/Tahanan	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan movev	Belum terlaksana	
																															37.456.800	37.456.800	TW IV	evaluasi Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani (November)	TW IV	Terlaksana Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan movev	Belum terlaksana	

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	% Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia=AB x100% Keterangan: A = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan B = Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan	kerjasama dengan puskesmas/ RS dan dinas kesehatan dan Penyuluhan kesehatan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang pola hidup sehat sehingga meningkatkan derajat fisik dan mental	
		Layanan Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)=AB x100% Keterangan: A = Jumlah tahanan/narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan B = Jumlah tahanan/narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan	kerjasama dengan puskesmas/ RS dan dinas kesehatan setempat	
		x% Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular=A/B x100% A=Jumlah Narapidana dengan HIV/AIDS ditekan jumlah virusnya.Jumlah Narapidana dengan HIV/AIDS>100% B=Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh.Jumlah Narapidana dengan TB Positif>100% Keterangan: A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV/AIDS B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif	kerjasama dengan puskesmas/ RS dan dinas kesehatan setempat	
		% Perubahan Kualitas Hidup Penyalahgunaan Narkoba=A/B x100% Keterangan: A = Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna narkoba yang mengikuti program rehabilitasi. B = Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna narkoba yang mendapatkan layanan rehabilitasi	kerjasama dengan puskesmas/ RS dan dinas kesehatan, BNN dalam melaksanakan penyuluhan bahaya Narkoba	
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna narkoba penyalahgunaan narkotika berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	20%			
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100%	% Menurunnya Tahanan Yang Overstaying =B/A x100% Keterangan: A = Jumlah Tahanan Overstaying B = Jumlah Tahanan	kerjasama yang bersinergitas antara instansi terkait (Kepolisian,Kejaksaan,dan Pengadilan).
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	% Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Penyuluhan Hukum=AB x100 Keterangan: A = Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum B = Jumlah Tahanan yang mengajukan Layanan Penyuluhan Hukum	kerjasama dengan OBH
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100%	% Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum=AB x100% Keterangan: A = Jumlah Tahanan Yang memperoleh fasilitas bantuan hukum B = Jumlah Tahanan yang mengajukan fasilitas bantuan hukum	kerjasama dengan OBH dan Pelayanan Hukum

38.120.000	TW I	Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Narapidana/tahanan secara berkala. Pemberian bimbiting konseling. Melaksanakan skrining medis. Pemberian makanan tambahan berupa makanan tinggi kalori tinggi protein (Februari, Mei, Agustus dan November)	TW I	Teraksananya pemeriksaan kesehatan Narapidana/tahanan secara berkala. Pemberian bimbiting konseling. Melaksanakan skrining medis. Pemberian makanan tambahan berupa makanan tinggi kalori tinggi protein	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan movev	Belum terlaksana
17.093.200	TW II		TW II			Belum terlaksana
31.080.000	TW III		TW III			Belum terlaksana
37.456.800	TW IV		TW IV			Belum terlaksana
38.120.000	TW I	1.Pemeriksaan kesehatan Narapidana/tahanan secara berkala 2.Pemenuhan obat-obatan bagi penyandang disabilitas 3.Layanan kesehatan mental 4.Skrining medis (Februari, Mei, Agustus dan November)	TW I	1. Teraksananya Pemeriksaan kesehatan Narapidana/tahanan secara berkala 2. Teraksananya Pemenuhan obat-obatan bagi penyandang disabilitas 3. Teraksananya Layanan kesehatan mental 4. Teraksananya Skrining medis	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan movev	Belum terlaksana
17.093.200	TW II		TW II			
31.080.000	TW III		TW III			
37.456.800	TW IV		TW IV			
38.120.000	TW I	1.Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Narapidana/tahanan secara berkala 2.Melakukan pengawasan terhadap WSP yang memiliki penyakit HIV/AIDS pengidap TBC secara rutin 3.Menempatkan Narapidana/tahanan di blok khusus/terpisah (Februari, Mei, Agustus dan November)	TW I	1.Teraksananya pemeriksaan kesehatan Narapidana/tahanan secara berkala 2. Teraksananya pengawasan terhadap WSP yang memiliki penyakit HIV/AIDS pengidap TBC secara rutin 3. Teraksananya penempatan Narapidana/tahanan di blok khusus/terpisah	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan movev	Belum terlaksana
17.093.200	TW II		TW II			
31.080.000	TW III		TW III			
37.456.800	TW IV		TW IV			
38.120.000	TW I	1. Pemenuhan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi Narapidana/tahanan 2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Narapidana/tahanan secara berkala 3. Layanan rehabilitasi narkotika (Februari, Mei, Agustus dan November)	TW I	1. Teraksananya Pemenuhan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi Narapidana/tahanan 2. Teraksananya pemeriksaan kesehatan Narapidana/tahanan secara berkala 3. Teraksananya Layanan rehabilitasi narkotika	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan movev	Belum terlaksana
17.093.200	TW II		TW II			
31.080.000	TW III		TW III			
37.456.800	TW IV		TW IV			
38.120.000	TW I	Melaksanakan sosialisasi layanan penyuluhan hukum kepada tahanan dan narapidana (Februari)	TW I	Teraksananya sosialisasi layanan penyuluhan hukum kepada tahanan dan narapidana	Laporan data dukung serta dokumentasi kegiatan movev terkait layanan overstaying pada UPT Pemasyarakatan	Belum terlaksana
17.093.200	TW II	monitoring narapidana yang mendapatkan layanan penyuluhan hukum (Mei)	TW II	Teraksananya narapidana yang mendapatkan layanan penyuluhan hukum		Belum terlaksana
31.080.000	TW III	monitoring narapidana yang penyuluhan mendapatkan layanan hukum (Agustus)	TW III	Teraksananya narapidana yang mendapatkan layanan penyuluhan hukum		
37.456.800	TW IV	Evaluasi narapidana yang penyuluhan mendapatkan layanan hukum (November)	TW IV	Teraksananya Evaluasi narapidana yang mendapatkan layanan penyuluhan hukum		
38.120.000	TW I	Melaksanakan sosialisasi layanan bantuan hukum kepada tahanan dan narapidana (februari)	TW I	Teraksananya sosialisasi layanan bantuan hukum kepada tahanan dan narapidana	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
17.093.200	TW II	monitoring narapidana yang mendapatkan layanan bantuan hukum (mei)	TW II	Teraksananya narapidana yang mendapatkan layanan bantuan hukum		
31.080.000	TW III	monitoring narapidana yang penyuluhan mendapatkan layanan bantuan hukum (agustus)	TW III	Triksananya narapidana yang penyuluhan mendapatkan layanan bantuan hukum		
37.456.800	TW IV	Evaluasi narapidana yang mendapatkan layanan bantuan hukum (november)	TW IV	Teraksananya Evaluasi narapidana yang mendapatkan layanan bantuan hukum		

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Koprabadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	<p>Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian keprabadian</p>	75%	<p>% Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Keprabadian =AB >100%</p> <p>Keterangan: A = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi Yang Memperoleh Nilai Baik dan Sangat Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Keprabadian B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan.</p>	Melakukan penilaian perilaku melalui Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)
	<p>Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi</p>	100%	<p>% Predikat Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi =AB >100%</p> <p>Keterangan: A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi</p>	Melaksanakan Bimtek terkait Remisi
	<p>Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi</p>	90%	<p>% Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi =AB >100%</p> <p>Keterangan: A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial.</p>	Melaksanakan Bimtek terkait integrasi
	<p>Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan</p>	90%	<p>% Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan =AB >100%</p> <p>Keterangan: A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan (narapidana tidak memiliki latar belakang Pendidikan formal) B = Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal</p>	UPT Pemasyarakatan melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan setempat dan LSM
	<p>Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin</p>	19%	<p>% Perubahan Perilaku Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin =AB >100%</p> <p>Keterangan: A = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin B = Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan</p>	Melakukan sosialisasi dan kegiatan pembinaan keprabadian kepada warga binaan pemasyarakatan
	<p>Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi</p>	34%	<p>% Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi =AB >100%</p> <p>Keterangan: A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi B = Jumlah Narapidana yang mendapatkan pelatihan</p>	Melakukan kerjasama dengan dinas ketenagakerjaan setempat
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	<p>Persentase narapidana yang bekerja dan produktif</p>	77%	<p>% Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan =AB >100%</p> <p>Keterangan: A = Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga B = Jumlah Klien Usia Produktif</p>	Kerjasama dengan LSM untuk melaksanakan program kemandirian dan pelatihan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan
	<p>Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya</p>	90%	<p>% Pengelolaan Basan Baran =AB x 100%</p> <p>Keterangan: A = Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran B = Jumlah Penilaian Depresiasi Basan Baran</p>	Kerjasama yang bersinergis antara instansi terkait (kejaksaan) dan Mensosialisasikan tentang pemeliharaan basan dan baran
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	<p>Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap</p>	100%	<p>% Basan baran yang dikeluarkan dan Berkuatan Hukum Tetap =AB >100%</p> <p>Keterangan: A = Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi B = Jumlah Benda Sitaan yang telah ikhtlah (berkuatan hukum tetap)</p>	Bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan pelelangan
	<p>Persentase pengadilan yang ditindaklanjuti sesuai standar</p>	90%	<p>% Persentase Pengadilan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar =AB >100%</p> <p>Keterangan: A = Jumlah Pengadilan yang diselesaikan B = Jumlah Pengadilan yang masuk</p>	Melakukan inventaris pengadilan yang masuk dari kotak pengadilan, email, media sosial maupun secara langsung

38.120.000	TW I	Pelaksanaan Sosialisasi kepada seluruh Lapas Rutan, PKA melalui penyampaian Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) (februari)	TW I	Teraksananya Sosialisasi kepada seluruh Lapas Rutan, PKA melalui penyampaian Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
17.093.200	TW II	Melaksanakan penilaian sesuai standar SPNN (mei)	TW II	Teraksananya penilaian narapidana sesuai standar SPNN		
31.000.000	TW III	Melaksanakan penilaian sesuai standar SPNN (Agustus)	TW III	Teraksananya penilaian narapidana sesuai standar SPNN		
37.456.800	TW IV	Moner penilaian SPNN (november)	TW IV	Tercapainya penilaian SPNN terhadap narapidana		
131.092.000	TW III	peningkatan petugas registrasi dalam pemberian pelayanan remisi online kepada narapidana melalui aplikasi SDP (Agustus)	TW III	Teraksananya bimtek terkait peningkatan petugas registrasi dalam pemberian pelayanan remisi online kepada narapidana melalui aplikasi SDP	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
131.092.000	TW III	pengembangan profesionalisme petugas dalam mengusulkan asimilasi, PB, CB, CMB, CMK melalui online prosedur (Agustus)	TW III	Teraksananya pengembangan profesionalisme petugas dalam mengusulkan asimilasi, PB, CB, CMB, CMK melalui online prosedur	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
3.190.000	TW II	Melaksanakan dan mendorong warga binaan untuk mengikuti ujian paket sekolah A, B dan C pada seluruh jenjang pendidikan (Juni)	TW II	Teraksananya warga binaan untuk mengikuti ujian paket sekolah A, B dan C pada seluruh jenjang pendidikan	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
17.093.200	TW II	Kegiatan Sosial dan pembinaan keprabadian dalam pemantauan perubahan perilaku menuju sadar patuh dan disiplin (juni)	TW II	Teraksananya Kegiatan Sosial dan pembinaan keprabadian dalam pemantauan perubahan perilaku menuju sadar patuh dan disiplin	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
1.050.000	TW IV	Kegiatan Sosial dan pembinaan keprabadian dalam pemantauan perubahan perilaku menuju sadar patuh dan disiplin (desember)	TW IV	Teraksananya Kegiatan Sosial dan pembinaan keprabadian dalam pemantauan perubahan perilaku menuju sadar patuh dan disiplin	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
38.120.000	TW I	pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan jasa angrbisnis (maret)	TW I	Teraksananya pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan jasa angrbisnis	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
17.093.200	TW II	pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan jasa angrbisnis (juni)	TW II	Teraksananya pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan jasa angrbisnis		
31.000.000	TW III	pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan jasa angrbisnis (september)	TW III	Teraksananya pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan jasa angrbisnis		
37.456.800	TW IV	pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan jasa angrbisnis (desember)	TW IV	Teraksananya pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan jasa angrbisnis		
2.100.000	TW I	Melaksanakan program pembinaan kemandirian dan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (setiap bulan)	TW I	Teraksananya program pembinaan kemandirian dan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
2.100.000	TW II		TW II		Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
2.100.000	TW III		TW III			
2.100.000	TW IV		TW IV			
1.050.000	TW I	Memelihara dan merawat fisik Basan dan Baran selama ditampung di Rubasan, Melakukan kontrol baran basan secara berkala (setiap bulan)	TW I	Tercapainya pemeliharaan dan merawat fisik Basan dan Baran selama ditampung di Rubasan, Melakukan kontrol baran basan secara berkala		
1.050.000	TW II		TW II		Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
1.050.000	TW III		TW III			
1.050.000	TW IV		TW IV			
1.050.000	TW II	Melakukan koordinasi dengan KPKNL terkait lelang (juni)	TW II	Teraksananya koordinasi dengan KPKNL terkait lelang		
1.050.000	TW IV	Melakukan koordinasi dengan KPKNL terkait lelang (November)	TW IV	Teraksananya koordinasi dengan KPKNL terkait lelang	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
5.250.000	TW I	Monitoring layanan pengadilan UPT Pemasyarakatan (januari)	TW I	Tercapainya monitoring layanan pengadilan UPT Pemasyarakatan	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
5.250.000	TW II	Monitoring layanan pengadilan UPT Pemasyarakatan (april)	TW II	Tercapainya monitoring layanan pengadilan UPT Pemasyarakatan		
5.250.000	TW III	Monitoring layanan pengadilan UPT Pemasyarakatan (Juli)	TW III	Tercapainya monitoring layanan pengadilan UPT Pemasyarakatan		
5.250.000	TW IV	Monitoring layanan pengadilan UPT Pemasyarakatan (Oktober)	TW IV	Tercapainya monitoring layanan pengadilan UPT Pemasyarakatan		

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	% Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah «AB ×100% Keterangan A = Jumlah gangguan kamtib non alam yang dapat dicegah B = Jumlah seluruh gangguan kamtib non alam yang terjadi	Melakukan deteksi dini dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90%	% Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib «AB ×100% Keterangan A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang Tidak mengulangi pelanggaran (hanya 1x pelanggaran) B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib Data yang diambil adalah Tahanan/ narapidana/ anak yang terdaftar dalam register F atau pelanggaran berat	Sosialisasi kepada narapidana tentang pentingnya tata tertib agar mendapatkan pemenuhan hak-hak narapidana
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	% Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib «AB ×100% Keterangan A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas B = Jumlah Gangguan Kamtib	Optimalisasi tugas dan fungsi unit Intelijen pemsayarakatan dalam melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib
	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga	70%	% Klien Usia Produktif yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan «AB ×100% Keterangan A = Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga B = Jumlah Klien Usia Produktif	Kerjasama dengan instansi/organisasi/lembaga untuk memberikan kesempatan kepada Klien Usia Produktif untuk memperoleh/melanjutkan pekerjaan di luar lembaga

29.123.000	29.123.000	TW I	Melaksanakan monitoring operasi gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemsayarakatan (januari)	TW I	Terlaksananya monitoring operasi gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemsayarakatan	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Terlaksana
17.093.200		TW II	Melaksanakan monitoring operasi gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemsayarakatan (april)	TW II	Terlaksananya monitoring operasi gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemsayarakatan		Belum terlaksana
31.080.000		TW III	Melaksanakan monitoring operasi gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemsayarakatan (juli)	TW III	Terlaksananya monitoring operasi gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemsayarakatan		
46.821.000		TW IV	Melaksanakan monitoring operasi gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemsayarakatan (oktober)	TW IV	Terlaksananya monitoring operasi gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemsayarakatan		
38.120.000		TW I	Melaksanakan Sosialisasi kepada narapidana tentang pentingnya tata tertib agar mendapatkan pemenuhan hak-hak narapidana (Maret)	TW I	Terlaksananya Sosialisasi kepada narapidana tentang pentingnya tata tertib agar mendapatkan pemenuhan hak-hak narapidana	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
17.093.200		TW II	Melaksanakan Sosialisasi kepada narapidana tentang pentingnya tata tertib agar mendapatkan pemenuhan hak-hak narapidana (Juni)	TW II	Terlaksananya Sosialisasi kepada narapidana tentang pentingnya tata tertib agar mendapatkan pemenuhan hak-hak narapidana		
31.080.000		TW III	Melaksanakan Sosialisasi kepada narapidana tentang pentingnya tata tertib agar mendapatkan pemenuhan hak-hak narapidana (September)	TW III	Terlaksananya Sosialisasi kepada narapidana tentang pentingnya tata tertib agar mendapatkan pemenuhan hak-hak narapidana		
46.821.000		TW IV	Evaluasi tentang pentingnya tata tertib agar mendapatkan pemenuhan hak-hak narapidana (Desember)	TW IV	Terlaksananya Evaluasi tentang pentingnya tata tertib agar mendapatkan pemenuhan hak-hak narapidana		
29.123.000	29.123.000	TW I	Memberikan pendampingan dan penguatan terkait fungsi intelijen dan pengamanan (januari)	TW I	Tercapainya pendampingan dan penguatan terkait fungsi intelijen dan pengamanan	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Terlaksana
17.093.200		TW II	Memberikan pendampingan dan penguatan terkait fungsi intelijen dan pengamanan (april)	TW II	Tercapainya pendampingan dan penguatan terkait fungsi intelijen dan pengamanan		Belum terlaksana
31.080.000		TW III	Memberikan pendampingan dan penguatan terkait fungsi intelijen dan pengamanan (Juli)	TW III	Tercapainya pendampingan dan penguatan terkait fungsi intelijen dan pengamanan		
46.821.000		TW IV	Memberikan pendampingan dan penguatan terkait fungsi intelijen dan pengamanan (Oktober)	TW IV	Tercapainya pendampingan dan penguatan terkait fungsi intelijen dan pengamanan		
31.080.000		TW I	Memberikan pelatihan dan keterampilan dengan bekerjasama dengan instansi terkait (maret)	TW I	Tercapainya pelatihan dan keterampilan dengan bekerjasama dengan instansi terkait	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
13.549.800		TW II	Memberikan pelatihan dan keterampilan dengan bekerjasama dengan instansi terkait (juni)	TW II	Tercapainya pelatihan dan keterampilan dengan bekerjasama dengan instansi terkait		
1.050.000		TW III	Memberikan pelatihan dan keterampilan dengan bekerjasama dengan instansi terkait (september)	TW III	Tercapainya pelatihan dan keterampilan dengan bekerjasama dengan instansi terkait		
1.050.000		TW IV	Evaluasi pelatihan dan keterampilan dengan bekerjasama dengan instansi terkait (Desember)	TW IV	Tercapainya Evaluasi pelatihan dan keterampilan dengan bekerjasama dengan instansi terkait		

Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada tiap lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	% Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara = $\frac{AB}{100}$ Keterangan A = Jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara B = Jumlah Anak yang mendapatkan pendampingan Capaian Kinerja = $(2 \times Target) - Realisasi / Target \times 100\%$...	Melakukan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversi	
	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40%	% Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya = $\frac{AB}{100}$ Keterangan A = Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan B = Jumlah Klien Anak	Kerjasama dengan dinas pendidikan dan LSM untuk mendapatkan hak pendidikan	
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85%	% Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat = $\frac{AB}{100}$ Keterangan A = Jumlah Anak yang Mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat B = Jumlah Anak	Melaksanakan kerjasama dengan BLK setempat serta Yayasan/Lembaga Masyarakat yang peduli dengan Anak	
	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	% Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi = $\frac{AB}{100}$ Keterangan A = Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi B = Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diizinkan memperoleh Hak Integrasi	Melaksanakan Bimtek terkait integrasi	
	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengusahaan sesuai standar	100%	% Anak Yang Memperoleh Hak Pengusahaan = $\frac{AB}{100}$ Keterangan A = Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengusahaan B = Jumlah Anak	Bekerjasama dengan BLK ataupun instansi lainnya	
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100%	% Pendidikan Formal Dan Non Formal = $\frac{AB}{100}$ Keterangan A = Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal B = Jumlah Anak	Bekerjasama dengan BLK ataupun instansi pemerintah lainnya	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian-B137:8196	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	0 UPT	Berdasarkan alokasi Pembangunan pada satu wilayah	Tersedianya layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian	
	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)	0 UPT	Berdasarkan alokasi Pembangunan pada satu wilayah	Tersedianya layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian	
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)	0 UPT	Berdasarkan alokasi Pembangunan pada satu wilayah	Tersedianya layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian	
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	0 UPT	Berdasarkan alokasi Pembangunan pada satu wilayah	Tersedianya layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian	
	Jumlah UPT Pembangunan Balai	0 UPT	Berdasarkan alokasi Pembangunan pada satu wilayah	Tersedianya layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian	

13.549.800	TW I	Monitoring pelaksanaan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversi (maret)	TW I	Tercapainya Monitoring pelaksanaan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversi		
31.080.000	TW II	Monitoring pelaksanaan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversi (Juni)	TW II	Tercapainya Monitoring pelaksanaan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversi	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
1.050.000	TW III	Monitoring pelaksanaan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversi (Oktober)	TW III	Tercapainya Monitoring pelaksanaan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversi		
13.549.800	TW I	Melaksanakan Ujian Paket A, B dan C kepada anak didik pemasyarakatan (maret)	TW I	Terlaksananya Ujian Paket A, B dan C kepada anak didik pemasyarakatan		
31.080.000	TW II	Melaksanakan Ujian Paket A, B dan C kepada anak didik pemasyarakatan (Juni)	TW II	Terlaksananya Ujian Paket A, B dan C kepada anak didik pemasyarakatan	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
1.050.000	TW III	Melaksanakan Ujian Paket A, B dan C kepada anak didik pemasyarakatan (Oktober)	TW III	Terlaksananya Ujian Paket A, B dan C kepada anak didik pemasyarakatan		
1.050.000	TW II	Memberikan akses kegiatan edukasi serta layanan informasi mengenai pendidikan	TW II	Terlaksananya akses kegiatan edukasi serta layanan informasi mengenai pendidikan	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
137.092.000	TW III	pengembangan profesionalisme petugas dalam mengusulkan asimilasi, PB, CB,CMB,CMK melalui online prosedur (Agustus)	TW III	Terlaksananya pengembangan profesionalisme petugas dalam mengusulkan asimilasi, PB, CB,CMB,CMK melalui online prosedur (Agustus)	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
1.050.000	TW II	Melakukan observasi (pengamatan) dan interview (wawancara) melalui instrumen penilaian pengusahaan anak (Juni)	TW II	Terlaksananya observasi (pengamatan) dan interview (wawancara) melalui instrumen penilaian pengusahaan anak	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
1.050.000	TW I	Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan (Maret)	TW I	Terlaksananya kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
1.050.000	TW II	Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan (Juni)	TW II	Terlaksananya kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan		
1.050.000	TW III	Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan (september)	TW III	Terlaksananya kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan		
1.050.000	TW IV	Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan (desember)	TW IV	Terlaksananya kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan		
1.050.000	TW I	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (maret)	TW I	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
1.050.000	TW II	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (juni)	TW II	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW III	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (september)	TW III	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW IV	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (Desember)	TW IV	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW I	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (maret)	TW I	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
1.050.000	TW II	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (juni)	TW II	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW III	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (september)	TW III	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW IV	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (Desember)	TW IV	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW I	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (maret)	TW I	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
1.050.000	TW II	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (juni)	TW II	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW III	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (september)	TW III	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW IV	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (Desember)	TW IV	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW I	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (maret)	TW I	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
1.050.000	TW II	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (juni)	TW II	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW III	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (september)	TW III	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW IV	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (Desember)	TW IV	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW I	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (maret)	TW I	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
1.050.000	TW II	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (juni)	TW II	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW III	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (september)	TW III	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW IV	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (Desember)	TW IV	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW I	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (maret)	TW I	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
1.050.000	TW II	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (juni)	TW II	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW III	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (september)	TW III	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
1.050.000	TW IV	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (Desember)	TW IV	Terlaksananya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		

Pemasyarakatan (Bapas)	1 UPT	Laporan pelaksanaan operasional di bidang Pemasyarakatan diperlukan gedung dan bangunan pada UPT Pemasyarakatan dalam satu wilayah	Tersedianya layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian	1.050.000	TW II	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (september)	TW III	Tertindakannya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian	Laporan dan data dukung serta dokumentasi kegiatan	Belum terlaksana
				1.050.000	TW III	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (Desember)	TW IV	Tertindakannya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
				1.050.000	TW I	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (maret)	TW I	Tertindakannya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
				1.050.000	TW I	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (juni)	TW II	Tertindakannya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
				1.050.000	TW II	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (september)	TW III	Tertindakannya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		
				1.050.000	TW III	Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian (Desember)	TW IV	Tertindakannya Monitoring layanan pemasyarakatan dan kapasitas hunian		



Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah



TAUFIQURRAKHMAN
NIP. 19651118 199103 1 001